**Pengelolaan Dunia Pendidikan di Indonesia; Tinjauan Kritis terhadap Sumberdaya Manusia dan Kebijakan, Perspektif Konvensional dan Perspektif Islam**

**Husnul Hotimah**1

**Baeti Rohman**2

1*Universitas Muhammadiyah Jakarta*  
2*Institut PTIQ Jakarta*

husnulfran@gmail.com

baetirohman@ptiq.ac.id

**Abstrak:**

Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan sebuah Negara, tidak terkecuali Indonesia. Manajemen pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia unggul yang lahir dari ruang pendidikan, sebaliknya manajemen pendidikan yang buruk tidak bisa menjadi daya dorong bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan yang perlu dibenahi secara serius, misalnya pada aspek kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dan kualitas tenaga pendidik, masalah lain adalah ketidakmerataan infrastruktur pendidikan khususnya di daerah pelosok. Sangat penting untuk mengambil langkah kolektif guna menuntaskan masalah dalam dunia pendidikan. Di tingkat elit dibutuhkan niat dan kesadaran pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan khususnya terkait besaran anggaran untuk sektor pendidikan, semestinya anggaran pendidikan masih perlu ditingkatkan bila ingin mewujudkan pendidikan berkualitas. Islam menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan, ada banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan pendidikan, bahkan secara spesifik Islam memandang mulia orang yang berilmu dengan mengangkat derajatnya.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Tinjauan Kritis, Islam, Kebijakan, Pendidik, Perspektif.

**Abstract:**

Education plays an important role in the development of a country, Indonesia is no exception. Good education management will give birth to superior human resources born from the education space, on the other hand, poor education management cannot be a driving force for the progress of the nation. In the context of Indonesia, there is still a lot of homework in the world of education that needs to be addressed seriously, for example in the aspect of government policy on education and the quality of teaching staff, another problem is the inequality of educational infrastructure, especially in remote areas. It is very important to take collective steps to solve problems in the world of education. At the elite level, it takes the government's intention and awareness to realize policies that favor the world of education, especially regarding the amount of the budget for the education sector, the education budget should still need to be increased if you want to achieve quality education. Islam pays special attention to education, there are many verses in the Qur'an that explain education, even specifically Islam views noble people who have knowledge by elevating their degrees.

**Keywords:** Education, Critical Review, Islam, Policy, Educator, Perspective

**Pendahuluan**

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya, semakin maju pendidikan maka Negara juga akan mengalami kemajuan yang pesat, dalam sejarah Negara bangsa tidak pernah ada Negara yang menikmati kemajuan tanpa didukung oleh kualitas pendidikan yang baik dalam Negara tersebut. Ibarat pohon, pendidikan merupakan akar yang memastikan pohon dan dahan bisa terus tumbuh. Dalam konteks Indonesia skema ini juga berlaku, jika Indonesia ingin tumbuh menjadi Negara maju, maka perhatian terhadap pendidikan merupakan sebuah kemestian.[[1]](#footnote-1) Terlampau tidak rasional bila pemerintah dan masyarakat Indonesia menginginkan negaranya maju tanpa membenahi sektor pendidikan. Diskursus tentang pentingnya memajukan pendidikan merupakan wacana yang telah lama digaungkan, semestinya wacana ini telah memasuki tahap realisasi seratus persen, namun nampaknya belum, hal ini dibuktikan dengan dunia pendidikan yang masih berkutat pada masalah klasik, seolah masalah ini tak bisa dituntaskan, padahal bila serius mengurusnya maka pasti ada jalan untuk menuntaskannya. Masalah pendidkan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, namun penting ditekankan bahwa dengan kewenangan besar yang dimiliknya maka pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memajukan pendidikan.

Pendidikan merupakan proses transfer pemikiran, karakter dan budaya. Jika dilakukan analisis sejarah, pendidikan secara terstruktur di Nusantara pertama kali hadir di masa kerajaan Hindu Budha. Pendidikan bercorak Hindu Budha berlangsung di Sumatera dan Jawa pada abad ke 7 M. pendidikan di masa itu diarahkan pada upaya mencapai kesempurnaan pribadi dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keahlian menunggang kuda, memainkan senjata dan keterampilan lainnya. Pada masa itu siswa tidak hanya mempelajari risalah agama tetapi juga mempelajari kepustakaan Hindu yang bercorak sastra seperti ramayan dan mahabarata, sistem pendidikan ini berlangsung dari abad ke 4 sampai ke 8 M.[[2]](#footnote-2)

Setelah runtuhnya kerajaan Hindu Budha, sistem pendidikan bernuansa Islam tampil sebagai model pendidikan terbaru di masa itu, hal ini disebabkan karena dominasi kerajaan Hindu Budha telah padam dan digantikan dengan dominasi kerajaan Islam yang menyebar dengan cepat di penjuru Nusantara. Sistem pendidikan Islam yang diterapkan relatif fleksibel, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya.[[3]](#footnote-3) Aktivitas pendidikan banyak digelar di tempat dan lembaga keagamaan seperti langgar, surau, masjid, madrasah dan pesantren. Langgar, surau dan masjid merupakan tempat tertua berlangsungnya aktivitas pendidikan, dalam perkembangan selanjutnya mulai dibuka madrasah dan pesantren. Pesantren di masa awal kemunculannya tidak serta-merta berbentuk seperti sekarang, pada awal masa berdirinya sistem pendidikan di pesantren masih sangat sederhana, seiring dengan perkembangan waktu pesantren terus berbenah, mencoba mengadopsi metode pengajaran yang lebih modern tanpa meninggalkan sisi keunikannya sebagai pesantren, bahkan saat ini ramai bermunculan pondok pesantren yang mengatasnamakan diri pesantren modern, pencapaian positif yang layak diapresiasi. Pesantren pada dasarnya merupakan salah satu sistem pendidikan asli Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Saat Indonesia berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda, sistem pendidikan turut mengalami perubahan. Sebagai penjajah, Belanda pada dasranya tidak berkepentingan memajukan pendidikan, Belanda lebih senang bila rakyat Indonesia tertinggal secara pengetahuan, sebab dalam kondisi ketertinggalan pengetahuan maka akan lebih mudah bagi Belanda untuk terus menjajah Indonesia. Belanda memang pernah menerapkan sistem politik etis yang didalamnya mencakup pemberian ruang pendidikan bagi rakyat Indonesia. Tetapi sistem ini dijalankan setengah hati dan hanya diprioritaskan kepada anak-anak pribumi dari kaum priayi, sementara rakyat biasa hampir tidak diberi ruang untuk mengakses pendidikan yang layak, pendidikan yang diperoleh anak kaum priayi levelnya tetap berada di bawah anak Belanda kulit putih yang tinggal di Indonesia. Memasuki era penjajahan Jepang hamper tidak ada perubahan berarti dalam dunia pendidikan. Jepang hanya menghilangkan model pengajaran colonial dan model pengajaran bumiputera lalau menggantikan dengan sekolah rakyat yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat, Jepang menamai sekolah ini dengan istilah “*kokumin gakko*”.[[5]](#footnote-5)

Setelah berhasil mencapai kemerdekaan, Indonesia sebagai Negara punya hak dan kewenangan penuh untuk merumuskan dan mengelola sistem pendidikannya sendiri. Di masa orde lama pendidikan cenderung bersifat patriotisme, nilai patriotisme disusupkan jauh ke dalam jantung pendidikan, hal ini bisa dipahami mengingat Indonesia sebagai Negara yang baru merdeka sangat berkepentingan memastikan peserta didik memiliki jiwa cinta tanah air yang tinggi. Pada masa orde baru dunia pendidikan mengalami perubahan nuansa, pendidikan cenderung menjadi alat propaganda penguasa, pemerintah melakukan intervensi serius terhadap dunia pendidikan, khusunya pemahaman tentang pancasila, pemahaman tentang pancasila yang diajarkan di lembaga pendidikan merupakan tafsiran pancasila menurut orde baru, bukan pancasila yang sesungguhnya. Orde baru melakukan pengawasan ketat terhadap perguruan tinggi agar mahasiswa tidak melakukan gerakan yang mengancam kekuasan orde baru.[[6]](#footnote-6) Saat memasuki reformasi hingga kini, dunia pendidikan relatif lebih bebas, tidak lagi diintervensi ketat layaknya di era orde baru. Hal ini merupakan buah dari perubahan konstitusi yang menyebabkan kampus bebas dari intervensi dan pengaruh luar, persoalan otonomi perguruan tinggi sempat menjadi wacana hangat di masa reformasi, pendidikan keagamaan juga mendapat perhatian khusus di era reformasi. Terlepas dari semua itu, masalah dalam dunia pendidikan masih tetap kompleks.

**Masalah Terkini Dunia Pendidikan**

Dunia pendidikan memiliki masalah yang cukup kompleks, sebagian masalah tersebut merupakan persoalan klasik yang tak kunjung diatasi. Identifikasi masalah dunia pendidikan terbilang urgen, tidak mungkin mampu memajukan pendidikan tanpa mengetahui masalah yang melanda dunia pendidikan. Masalah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, ini merupakan masalah pada aspek manajemen sumber daya manusia sebagai pendidik. Kualitas pendidik meruapakan salah satu kunci utama memajukan pendidikan.[[7]](#footnote-7) peserta didik yang unggul lahir dari tenaga pendidik yang unggul. Terlampau susah mewujudkan pendidikan yang maju tanpa hadirnya tenaga pendidik yang berkualitas. Rendahnya kualitas tenaga pendidik disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya tingkat literasi di kalangan pendidik yang tidak merata, seorang tenaga pendidik seharusnya rutin meluangkan waktu membaca buku dan mengakses informasi terbaru terkait pendidikan agar pengetahuannya dalam mendidik terus bertambah, namun tidak sedikit tenaga pendidik yang memiliki minat baca yang rendah, akhirnya yang ditransformasikan kepada anak didiknya hanya pengetahuan lama, sementara pengetahuan terus berkembang dengan cepat.

Masalah kedua adalah infrastruktur yang minim, ini merupakan masalah yang sangat mendasar, masalah ini paling banyak dijumpai di daerah pelosok, bahkan sekolah yang terletak di perkampungan yang tidak terpencil juga masih ada yang berkutat dengan infrastruktur yang minim. Minimnya infrastruktur bisa terjadi dalam bentuk ruang kelas yang tidak layak pakai, ruang kelas yang tidak cukup untuk menampung siswa, ruang kelas yang roboh akibat sudah sangat lapuk dan tidak pernah dilakukan perbaikan, bahkan yang lebih miris di daerah tertentu siswa harus berjalan ke daerah lain karena di daerahnya tidak ada sekolah bahkan untuk level SD. Ketimpangan infrastruktur pendidikan merupakan bukti nyata bahwa keadilan belum dirasakan oleh semua anak bangsa.[[8]](#footnote-8) Pendidikan yang maju seolah hanya menjadi angan belaka bila infrastruktur fisik tidak dibenahi secara serius. Tidak mungkin peserta didik bisa belajar aman dan nyaman bila ruang kelas mereka jauh dari kata layak, tidak mungkin seluruh anak banga bisa dicerdaskan bila di berbagai perkampungan di Indonesia masih tidak memiliki bangunan sekolah.

Masalah ketiga terkait kebijakan pemerintah, pendidikan merupakan salah satu sektor yang dikelola oleh pemerintah, dalam kasus ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib merealisasikan kebijakan yang berpihak kepada dunia pendidikan. Keberpihakan pemerintah salah satunya bisa diukur dari besaran alokasi anggaran. Berdasarkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2021 yang saat itu masih bernama Kemendikbud jumlah anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN, yakni sekitar 550 Triliun, jumlah tersebut terkesan fantastis, akan tetapi sebenarnya masih terbilang sedikit, jika pemerintah serius ingin membenahi pendidikan maka seharusnya besaran APBN untuk sektor pendidikan masih perlu ditambah, bahkan semestinya APBN paling banyak disalurkan ke sektor pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan anggaran, sektor pendidikan belum menjadi prioritas pertama. Rancaunya kebijakan dalam dunia pendidikan juga tercermin dalam kebiasaan gonta-ganti kurikulum pendidikan. Seringkali sebuah kurikulum belum diterapkan di semua sekolah tetapi sudah muncul lagi kurikulum baru. Terdapat kecenderungan setiap menteri menjabat berusaha merubah kurikulum, motifnya lebih pada keinginan untuk meninggalkan legasi saat ia sudah tidak menjabat. Peserta didik dan pendidik adalah pihak yang paling dirugikan dengan kebiasaan gonta-ganti kurikulum.[[9]](#footnote-9)

**Urgensi Memajukan Sektor Pendidikan**

John Dewey seorang filsuf dan pemikir pendidikan memandang bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalaman, pendidikan harus membantu proses pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi usia, hal ini karena kehidupan merupakan proses pertumbuhan yang berarti proses penyesuain pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan.[[10]](#footnote-10) Pandangan John Dewey ini menekankan bahwa sangat urgen untuk terus memajukan sektor pendidikan karena berperan penting terhadap peningkatan kecakapan hidup seseorang untuk jangka panjang. Pendidikan juga berperan penting dalam memanusiakan manusia, hal ini sebagaimana diungkap Driyarkara, menurutnya pendidikan dibutuhkan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani.[[11]](#footnote-11) Driyarkara ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah proses perubahan ganda yakni perubahan dalam diri manusia sendiri yang disebut perubahan eksistensia dan perubahan diri wajib menyatu dengan perubahan masyarakat serta budaya.

Pendidikan berpengaruh terhadap rohani dan jasmani individu, demikian menurut Ahmad D Marimba, dalam pandanagnnya proses bimbingan yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik diarahkan pada proses perkembangan jasmani dan rohani peserta didik yang bertujuan agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul, kepribadian yang dimaksud Ahmad D Marimba memiliki makna yang mendalam, yakni pribadi yang baik secara karakter, bukan hanya pintar secara akademik.[[12]](#footnote-12) Untuk membentuk kecerdasan karakter dan kecerdasan akademik maka sektor pendidikan harus terus bertransformasi menuju kemajuan, zaman modern menyajikan banyak problematika kehidupan yang tidak mungkin bisa dihadapi bila seseorang tidak memiliki kecerdasan karakter. Untuk memajukan sektor pendidikan maka identifikasi terhadap masalah yang melanda dunia pendidikan adalah sebuah keharusan, daftar masalah tersebut telah diurai sebagaimana tertera di atas (Bagian B), lalu langkah apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi masalah dalam dunia pendidikan? Siapa saja yang perlu terlibat untuk mengatasi masalah tersebut? Pertanyaan ini membutuhkan pembahasan yang mendalam.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kajian pustaka, pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, literatur yang dimaksud adalah Al-Qur’an, buku dan artikel. Pasang surut dunia pendidikan berupaya ditinjau secara kritis, ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan dijadikan dasar untuk mengurai lebih lanjut benang kusut dalam dunia pendidikan. Demikian pula buku dan artikel dibutuhkan sebagai bahan kajian pustaka karena buku dan artikel merekam dinamika panjang pasang surut dunia pendidikan, baik pada aspek kebijakan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusia. Analisis yang dikembangkan dari Al-Qur’an, buku dan artikel diharapkan mampu melahirkan pemikiran baru yang berkontribusi pada ikhtiar memajukan dunia pendidikan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dibutuhkan upaya kolektif untuk memajukan sektor pendidikan. Langkah itu dimulai dengan mencari solusi terbaik guna mengatasi permasalah terkini dalam dunia pendidikan. Kesadaran struktural dan kesadaran personal perlu didorong untuk bekerjasama mencari jalan keluar atas runyamnya masalah dalam dunia pendidikan. Keharusan untuk bekerjasama dalam kebaikan merupakan bagian dari ajaran islam, hal itu sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat *2 “Dan tolong menolonglah kamu dalam mngerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah rahmat bagi alam semesta, penerapan pendidikan harus berlaku rata bagi semua kalangan tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, dan golongan. Pendidikan akan menjadi rahmat bagi alam semesta sepanjang melalui tiga proses, yakni internalisasi pendidikan sebagai nilai, keyakinan, pengetahuan sesuai dengan kemampuan akal seseorang. Selanjutnya proses eksternalisasi yang diwujudkan dalam tindakan, perilaku, dan sikap. Setelah itu masuk tahap ebyektifikasi dengan pertimbangan kognitif dan budaya yang kemudian melahirkan kriteria kemasyarakatan yang berilmu pengetahuan sehingga mampu menebar kemaslahatan kepada yang lain tanpa mengganggu hak asasi serta mampu berdampinagn dengan kesejahteraan bersama.[[13]](#footnote-13)

**Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Tenaga Pendidik**

Kemajuan pendidikan bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Salah satu masalah krusial dalam dunia pendidikan adalah tidak meratanya kualitas tenaga pendidik, bahkan tidak sedikit tenaga pendidik yang kualitasnya dalam mendidik belum sesuai harapan. Menyikapi masalah ini maka sangat urgen untuk melakukan ikhtiar serius meningkatkan kualitas tenaga pendidik, ada beberapa langkah strategis sekaligus teknis yang bisa dilakukan. Pertama, mendorong minat baca di kalangan pendidik, tidak bisa dipungkiri asupan pengetahuan berkontribusi pada kualitas pendidik, pendidik yang berkualitas adalah mereka yang memiliki banyak pengetahuan yang bisa dibagi kepada peserta didik,[[14]](#footnote-14) pengetahuan tersebut tentu bersumber dari buku, semakin sering seorang pendidik membaca buku maka semakin banyak pula ilmu yang bisa ditransformasikan kepada peserta didik. Pada saat yang sama budaya membaca di kalangan pendidik bisa menjadi contoh bagi peserta didik untuk melakukan tindakan yang sama, mereka akan termotivasi membaca bila melihat gurunya rajin membaca, sebaliknya akan susah menanamkan budaya baca kepada siswa bila minim contoh dari guru.[[15]](#footnote-15)

Seorang pendidik yang punya tradisi baca yang kuat mampu mengajarkan mata pelajaran dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan buku panduan. Perlu menumbuhkan kembali kesadaran di kalangan pendidik bahwa tanggung jawab utama mereka adalah mencerdaskan anak bangsa, sebuah tanggung jawab yang besar.[[16]](#footnote-16)

Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa maka pendidik harus punya pengetahuan yang cukup, kecerdasan anak bangsa tidak mungkin terwujud bila pendidik selaku tulang punggung justru nyaman dengan kebiasaan jarang membaca. Semestinya kesadaran tentang tanggung jawab mencerdasakan anak bangsa telah terpatri bahkan sebelum menjadi pendidik, kesadaran tersebut harus muncul saat seorang ingin menjadi pendidik, jangan sampai motivasi menjadi pendidik hanya karena tergiur besaran gaji dan jaminan pensiun, bila ini yang muncul maka akan mendatangkan konsekuensi serius saat orang itu sudah menjadi pendidik, oleh sebab itu penting meluruskan niat dari awal, mehami dan menyadari tanggung jawab sesungguhnya dari seorang pendidik.[[17]](#footnote-17)

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas pendidik adalah mengintenskan pelatihan bagi para tenaga pendidik, pelatihan yang dimaksudkan adalah yang mengarah pada peningkatan kompetensi dalam berbagai hal. Bagian ini merupakan tugas penting pemerintah dalam hal ini kementerian dan dinas terkait. Pelatihan ini perlu dibuat secara berkala, bisa dalam jangka waktu per triwulan, dua bulan, atau setiap bulan. Pelatihan ini juga mesti disertai dengan mekanisme evaluasi yang jelas, hal ini dimaksudkan agar level kualitas pendidik bisa diukur dari waktu ke waktu, bila terjadi peningkatan maka model pelatihan tersebut layak dipertahankan sedangkan bila terjadi penurunan maka model pelatihan perlu dievaluasi.[[18]](#footnote-18) Selain pelatihan yang digelar secara formal oleh pemerintah maka penting juga bagi guru untuk berikhtiar mengikuti pelatihan pengembangan kualitas pendidik yang saat ini sudah banyak dugelar oleh oleh berbagai lembaga swasta. Peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga pendidik merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Dibutuhkan manajemen yang handal untuk meningkatkan sumber daya manusia.

**Melakukan Pembenahan Serius Terhadap Infrastruktur Pendidikan**

Sampai saat ini minimnya infrastruktur pendidikan masih menjadi masalah dalam dunia pendidikan, hal ini khususnya paling terasa di daerah pelosok, terjadi perbedaan mencolok antara infrastruktur pendidikan di daerah perkotaan dengan infrastruktur pendidikan di daerah pelosok, di daerah perkotaan infrastruktur pendidikan cukup baik namun nasib yang sama tidak terjadi di daerah pelosok. Hal yang paling urgen dilakukan adalah melakukan pembenahan serius terhadap infrastruktur pendidikan, infrastruktur pendidikan yang layak merupakan hak semua anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah.[[19]](#footnote-19)

Untuk membenahi infrastruktur pendidikan dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah, tidak mungkin melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan tanpa kehadiran pemerintah, tanggungjawab utama utama memajukan pendidikan berada di pundak pemerintah, hal ini sangat rasional mengingat pemerintah memiliki sistem birokrasi yang bisa digerakkan untuk menangani masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, disamping itu pemerintah juga dibekali dengan wewenang penuh untuk mengambil kebijakan.[[20]](#footnote-20)

Pembenahan infrastruktur pendidikan berkaitan dengan kebijakan penganggaran, membangun infrastruktur tentu butuh dana, dana ini mesti disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN. Terlampau sulit bagi masyarakat untuk menerima alasan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk untuk membenahi infrastruktur pendidikan saat pemerintah sedang gencar membangun infrastruk di sektor lain, misalnya membangun pelabuhan, jalan tol, kereta apai cepat dan ragam infrastruktur lainnya.[[21]](#footnote-21) Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur di sektor lain tersebut tentu jauh lebih besar dibandingkan sekadar membangun atau memperbaiki gedung sekolah yang roboh. Jika pemerintah punya biaya besar untuk membangun infrastruktur di sektor lain maka seharusnya pemerintah juga memiliki anggaran yang lebih dari cukup untuk membangun infrastruktur pendidikan.

Ketika pemerintah gencar membangun infrastruktur di sektor selain pendidikan namun tidak maksimal membangun infrastruktur di bidang pendidikan, maka hal itu dapat memunculkan pertanyaan besar di benak masyarakat. Masyarakat dapat mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. Kasus yang terjadi di lapangan, terkadang pemerintah lebih bersifat pasif, mereka baru bergerak memberikan bantuan terhadap infrastruktur sekolah yang tidak layak saat kasus tersebut viral di media sosial, kasus ini juga sebenarnya terjadi pada sektor lain. Kasus ini menegaskan dua hal. Pertama, pemerintah tidak punya data valid tentang sarana dan prasarana pendidikan yang sudah tidak layak pakai dan butuh segera diperbaiki, bila ini terjadi maka aparat pemerintah tidak bekerja secara efektif, mereka jarang turun ke lapangan melakukan pengecekan berkala terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah kerjanya, ini merupakan ciri birokrasi yang bersifat elitis.[[22]](#footnote-22) Kedua, pemerintah boleh jadi memiliki data jumlah sekolah rusak atau infrastruktur pendidikan lainnya yang sudah tidak layak pakai bahkan mengancam keselamatan siswa namun tidak melakukan tindakan apapun, biasanya alasannya bersifat klasik, tidak tersedia anggaran untuk perbaikan, jawaban ini tentu tidak membantu, ada banyak cara yang bisa ditempuh aparat pemerintah untuk mengupayakan anggaran tanpa harus penunggu penganggaran di periode selanjutnya. Disini letak pentingnya mendesain sistem birokrasi yang bersifat fleksibel, model birokrasi yang selalu siap melayani rakyat, bila rakyat butuh maka tindakan harus diambil.

**Menghadirkan Kebijakan Yang Berpihak Pada Sektor Pendidikan**

Di Negara yang berhasil memajukan sektor pendidikannya, maka aspek kebijakan memainkan peran penting dalam kemajuan tersebut. Semuanya dimulai dengan tindakan pemerintah setempat yang berani mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada dunia pendidikan, misalnya Finlandia. Finlandia adalah Negara dengan prestasi dan sistem pendidikan terbaik di dunia, Negara ini menempati skor terbaik dalam survei penilaian siswa internasional (PISA). Menurut laporan *Big Think* yang dipublikasikan *World Economic Forum*, Finlandia menjadi Negara terdepan dalam dunia pendidikan karena kebijakan pemerintahnya yang total berpihak pada pendidikan, misalnya memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minta dan bakat.

Hal yang berhasil dicapai Finlandia sangat mungkin bisa dilakukan Indonesia, dengan catatan pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata dalam bentuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan, kebijakan itu bisa diarahkan pada penataan sistem pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sepatutnya memperhatikan kebutuhan nyata di sektor pendidikan, dalam perspektif kebijakan publik, sebuah kebijakan diambil untuk melayani kebutuhan masyarakat, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah kebijakan yang keliru sehingga mesti dievaluasi.[[23]](#footnote-23) Poin pentingnya adalah pemerintah mesti bisa mengidentifikasi sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat dalam dunia pendidikan, kebutuhan itu yang perlu disikapi dengan mengeluarkan kebijakan.

Terdapat berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan yang perlu dievaluasi karena tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, misalnya kebijakan gonta-ganti kurikulum, ini tentu kebijakan yang tidak tepat, kebijakan ini berpotensi membingungkan peserta didik dan tenaga pendidik, dalam praktiknya mereka tidak punya waktu yang cukup untuk akrab dengan suatu kurikulum namun kurikulum telah berganti lagi.[[24]](#footnote-24)

Di sisi lain kebijakan gonta ganti kurikulum merupakan bentuk penghamburan anggaran, sebagaimana diketahui bersama proses penyusunan kurikulum menggunakan anggaran Negara, ketika kurikulum diberlakukan dan mulai disosialisasikan kepada para tenaga pendidik maka anggaran Negara juga digunakan untuk kegiatan ini, bisa dibayangkan berapa anggaran Negara yang habis untuk kebijakan yang urgensinya masih dipertanyakan. Memang tidak ada larangan melakukan pergantian kurikulum, bahkan perlu diganti bela memang dibutuhkan, tetapi tidak sepatutnya pergantian itu terlalu sering dilaksanakan, lain presiden lain menteri lain pula kurikulumnya, terkesan pergantian kurikulum berdasarkan selera menteri, ini tidak bagus. Pergantian kurikulum semestinya dilandasi oleh kajian ilmiah yang mendalam dan tidak diputuskan oleh seorang menteri belaka, harus ada peraturan yang yang berfungsi mengetatkan pergantian kurikulum, dengan begitu kurikulum berganti berdasarkan basis kebutuhan, bukan selera.

Aspek lain yang perlu dievaluasi dalam kebijakan pendidikan adalah terkait anggaran pendidikan. Saat ini anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Walaupun terkesan besar namun angka ini belum cukup untuk menunjang keberlangsungan sektor pendidikan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai namun tak kunjung mendapat perbaikan dengan alasan ketiadaan alokasi anggaran dari pemerintah. Pada tahun 2020 saja berdasarkan data Kemendikbudristek terdapat 969.817 sekolah rusak, terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. Angkanya bertambah 26 persen atau sekitar 250.000 unit dari 2019-2020. Fakta ini mengonfirmasi pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. Pada praktiknya memang tidak ada larangan bagi masyarakat sipil baik lembaga maupun perorangan untuk mendonasikan sebagian hartanya dalam rangka perbaikan sekolah rusak, akan tetapi hal itu sifatnya lebih berbentuk dukungan yang dilakukan secara sukarela, jumlahnya juga terbatas, tanggung jawab utama untuk perbaikan infrastruktut pendidikan tetap berada di tangan pemerintah.[[25]](#footnote-25)

**Sudut Pandang Islam Dalam Memajukan Pendidikan**

Pendidikan adalah bagian penting dari ajaran Islam, aktivitas pendidikan telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa awal kerasulan, cara Rasulullah mendidik para sahabat adalah bagian dari aktivitas pendidikan. Jika mengacu pada Al-Qur’an, Surat Al-A’laq ayat 1-5 sebagai surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbicara tentang pendidikan *“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”*.

Dalam pandangan Islam ada beberapa langkah krusial dalam memajukan sektor pendidikan. Pertama, memastikan profesionalisme tenaga pendidik. Profesi merupakan suatu keahlian dalam melakukan pekerjaan, sesuatu hal yang sangat ditekankan dalam Islam, dalam Islam suatu perkara harus diserahkan kepada ahlinya. Menurut Islam profesi dijalankan sebagai pengabdian kepada dua obyek, yakni kepada Allah dan kepada Manusia.[[26]](#footnote-26) Dalam konteks pendidikan maka seorang guru dalam menjalankan tugasnya pada dasarnya sedang menjalankan perintah Allah untuk menyebarluaskan ilmu yang dimiliknya, pada saat yang serupa ia juga sedang membimbing siswa menuju pencerahan. Sangat beralasan bila Islam menekankan profesionalisme bagi pendidik, pendidik yang tidak memiliki profesionalisme dalam mendidik berpotensi mengorbankan peserta didik, siswa dapat mendapat kerugian besar.

Kedua, kerjasama di antara *stake holder* pendidikan. Islam menilai kemajuan pendidikan salah satunya ditentukan oleh adanya kerjasama yang baik di antara *stake holder* pendidikan, dalam hal ini tenaga pendidik dan pemerintah. Pemerintah berposisi sebagai pengambil kebijakan yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan sedangkan tenaga pendidik adalah pelaku yang menjalankan kebijakan tersebut.[[27]](#footnote-27) Kekurangan dan kelebihan sebuah kebijakan pertama kali dirasakan oleh tenaga pendidik sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan siswa. Tenaga pendidik semestinya diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka terkait baik atau buruknya sebuah kebijakan yang telah diberlakukan. Sebaliknya pemerintah sebagai pengambil kebijakan mesti mau membuka diri terhadap usulan dari tenaga pendidik. Tidak tepat memposisikan tenaga pendidik sebagai pihak yang hanya dituntut menjalankan perintah tanpa diberi ruang dialog.

Ketiga, memberlakukan mekanisme evaluasi yang tepat. Secara umum evaluasi bisa dikenakan kepada kebijakan pendidikan dan manajemen sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik. Perintah untuk melakukan evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan juga tertuang dalam Al-Qur’an *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan/mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr:18).* Evaluasi yang tepat pada kebijakan dan manajemen sumber daya manusia/tenaga pendidik dapat efektif meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi ini semestinya dilakukan secara berkala agar efektifitas kebijakan bisa diukur dan kualitas tenaga pendidik bisa terus dibenahi.

**Kesimpulan**

Dunia pendidikan di Indonesia mengalami pasang surut yang panjang, ragam masalah muncul dalam masa pasang surut tersebut. Untuk konteks terkini masalah itu meliputi tidak meratanya kualitas tenaga pendidik, infrastruktur yang minim, dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada sektor pendidikan. Demi mengatasi masalah tersebut maka perlu melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik, perubahan arah kebijakan, dan membangun infrastruktur pendidikan yang layak. Islam menekankan bahwa dalam konteks terkini ada tiga langkah yang perlu diambil untuk memajukan sektor pendidikan, yakni memaksimalkan kerjasama di anatara *stake holder* pendidikan, memberlakukan mekanisme evaluasi yang tepat, dan memastikan profesionalisme tenaga pendidik.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pasang surut dunia pendidikan yang ditinjau dengan menggunakn perspektif kritis, maka penting bagi pemerintah dan tenaga pendidik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar melakukan reformulasi kebijakan dalam dunia pendidikan supaya tercipta kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor pendidikan.
2. Bagi tenaga pendidik agar terus berpacu meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik.

**Daftar Pustaka**

Akbar, Ari. *Catatan Advokasi Mewujudkan Sekolah Aman Dan Nyaman*. Makassar: KOPEL Indonesia, 2017.

Arif, Fuad Noor. “Islam Dalam Perspektif Pendidikan.” *Quality* 3, no. 2 (Desember 2015): 411-432.

Boven, Fredick Ekayanta. “Ideology and Pragmatism: Discourse Factors in Infrastructure Dvelopment in Indonesia Jokowi-JK Era.” *Jurnal Politi UI* 4, no. 2 (Februari 2019): 298-328.

Dewey, John. *Experience and Education*. Bandung: Teraju, 2004.

Dewi, Mirnawati, dan Mukhlis. “Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.” *Al-Ghazali* 1, no. 1 (Juni 2021): 22-34.

Diantoro, Fery, Endang Purwati dan Erna Lisdiawati. “Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19.” *Ma'alim* 2, no. 1 (Juni 2021): 22-33.

Driyarkara. *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Haji, Edi, Burhanuddin Kiyai, dan Jericho D Pombengi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (Juni 2015): 1-14.

Hanifah, Unik Salsabila. “Upaya Dalam Memajukan Teknologi Pendidikan Indonesia.” *Nusantara* 3, no. 3 (November 2021): 443-458.

Kubtiyah, Mariyatul Ritonga. “Pengaruh Pembangunan Infrastruk Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Education and Dvelopment STKIP Tapanuli Selatan* 7, no. 1 (November 2017): 79-82.

Marimba, D Ahmad. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1962.

Marlina, Silvia, Nofia Sherli, dan Iswantir. “Pengaruh Kompetensi Tenaga Pendidik Terhadap Kualitas Pendidikan Di Sumatera Barat.” *Al-Fahim* 4, no. 1 (September 2022): 86-99.

Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Filosofia Teoritis dan Aplikatif Normatif*. Jakarta: Amzah, 2013.

Muhdasin. *Jangan Menunggu Ruang Kelas Roboh: Praktik Terbaik dan Kisah Advokasi Sekolah Rusak*. Bogor: KOPEL Indonesia, 2019.

Muzammil, As’ad. “Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru.” *Potensia* 2, no. 2 (Dsember 2016): 183-198.

Novauli, Feralys. “Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri Dalam Kota Banda Aceh.” *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (Februari 2015): 45-67.

Ramadhani, Suci. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang.” *Jurnal Humanitas* 8, no. 1 (Desember 2021): 10-23.

Ritonga, Maimuna. “Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi.” *Bina Gogik* 5, no. 2 (September 2018): 88-102.

Rusfiana, Yudi, dan Cahya Supriatna. *“Memahami Birokarasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.

Sepriyanti, Nana. “Guru Profesional Adalah Kunci Mewujudkan Pendidikan Berkualitas.” *Jurnal Al-Ta’alim* 1, no. 1 (Februari 2012): 66-73.

Shaleh, Shabri Anwar. “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama.” *Psympathic* 1, no. 1 (Juni 2014): 11-21.

Susmihara. “Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara.” *Jurnal Rihlah* 6, no. 1 (Juli 2018): 13-32.

Syahruddin & Heri Susanto. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

Ulfah, Mariana Hoesny. “Permasalahan Dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka.” *Scholaria* 11, no. 2 (Mei 2021): 123-132.

Wahab, Solichin Abdul. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: UM Press, 2001.

Yunus, Muhammad. “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Asli Indonesia.” *Edification* 1, no 1 (Juni 2019): 112-118.

1. (Unik Hanifah Salsabila, 2021). [↑](#footnote-ref-1)
2. (Susanto, 2019) (Susanto, 2019) [↑](#footnote-ref-2)
3. (Susmihara, 2018) [↑](#footnote-ref-3)
4. (Yunus, 2019) [↑](#footnote-ref-4)
5. (Ramadhani, 2021). [↑](#footnote-ref-5)
6. (Muzammil, 2016) [↑](#footnote-ref-6)
7. (Silvia Marlina, 2022), [↑](#footnote-ref-7)
8. (Akbar, 2017) [↑](#footnote-ref-8)
9. (Muhammedi, 2016) [↑](#footnote-ref-9)
10. (Dewey, 2004) [↑](#footnote-ref-10)
11. (Driyarkara, 2007) [↑](#footnote-ref-11)
12. (Marimba, 1962) [↑](#footnote-ref-12)
13. (Noor, 2015). [↑](#footnote-ref-13)
14. (Sepriyanti, 2012) [↑](#footnote-ref-14)
15. (Mukhlis, 2021) [↑](#footnote-ref-15)
16. (Novauli, 2015) [↑](#footnote-ref-16)
17. (Anwar, 2014). [↑](#footnote-ref-17)
18. (Darmayanti, 2021) [↑](#footnote-ref-18)
19. (Ritonga, 2017). [↑](#footnote-ref-19)
20. (Muhdasin, 2019). [↑](#footnote-ref-20)
21. (Ekayanta, 2019) [↑](#footnote-ref-21)
22. (Supriatna, 2021) [↑](#footnote-ref-22)
23. (Wahab, 2001) [↑](#footnote-ref-23)
24. (Ritonga M. , 2018). [↑](#footnote-ref-24)
25. (Edi Haji, 2015). [↑](#footnote-ref-25)
26. (Minarti, 2013) [↑](#footnote-ref-26)
27. (Fery Diantoro, 2021) [↑](#footnote-ref-27)